

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh :

**NURSYAKINA NAJUA
175310365**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahuinya apakah Akuntansi yang telah diterapkan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Data yang digunakan penulis pada Desa Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara kepada pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan seperti Kepala Desa dan Bendahara Desa. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemerintah dalam bentuk jadi seperti dokumen Laporan Keuangan Desa. Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan Metode Deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada pemerintahan Desa Pakning Asal telah ditemukannya beberapa permasalahan seperti, Desa Pakning Asal tidak menghitung nilai persediaan, Desa Pakning Asal tidak menghitung Penyusutan pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa Akuntansi yang diterapkan belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Keuangan Desa, IAI KASP (2015) dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

ABSTRACT

This research was conducted in Pakning Village from Bukit Batu Subdistrict, Bengkalis Regency. This study intends to find out if the accounting that has been applied Pakning village from Bukit Batu Subdistrict Bengkalis is guided by thee Principles of Accounting Grateful General.

The data used by the author in Pakning Village, Bukit Batu Subdistrict, Bengkalis Regency is Primary data and Secondary data. Primary data is data obtained through interviews to interested parties in government financial management such as village heads and village treasurers. While secondary data is data obtained from the government in the form of finished documents such as Village Financial Statements. Data Collection Techniques using interview and documentation techniques. Then the data obtained is analyzed using Descriptive Method.

The results of research that has been conducted in the government of Pakning Asal Village has found some problems such as, Pakning Asal Village does not calculate the value of supplies, Pakning Asal Village does not calculate depreciation in the Village Wealth Report. From the results of research conducted in Pakning Village From Bukit Batu Subdistrict, Bengkalis, it can be concluded that the accounting applied has not been in accordance with the General Grateful Accounting Principles.

Keywords : *Application of Village Financial Accounting, IAI-KASP (2015) and Generally Accepted Accounting Principles*

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta sayang nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Pakning Asal Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa sepenuhnya sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisannya. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si. Ak., CA Sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi dan seluruh staf dan rekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Dr. Siska SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Yusrawati , SE, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, membantu , mensupport dan memberi motivasi dalam bimbingan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Emkad Arif SE. M.Si Ak, CA , Ibu Halimahtussakdiah SE. M.Ak., Ak., CA , Ibu Eny Wahyuningsih M.Si., Ak. CA dan Ibu Haugesti Diana SE., M.Ak selaku

Penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil saya yang telah memberikan saran motivasi dan bimbingan hingga selesai.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang mana memberikan ilmu pengetahuan , motivasi kepada peneliti selama perkuliahan.
7. Bapak Jaswir selaku Kepala Desa dan Ibu Rozilah selaku Bendahara serta petugas Pemerintahan Desa yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada penulis selama penulis mengambil data dalam proses penelitian.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ibrahim, dan Ibu Nurbaya terimakasih atas doa, nasehat, kasih sayang, semangat, pengorbanan, dan bantuan yang tidak akan ternilai harganya yang telah ayah dan ibu berikan . Terimakasih untuk Kakak ku Reza Suci Nursyahira atas doa serta bantuan terhadap peneliti selama masa perkuliahan, begitu juga kepada adik-adik dan keluarga besar lainnya.
9. Teman-Teman Ayu Rosmita , Siska Indriyani, Miranda Resty Noviani yang selalu memberi semangat dukungan dan doa selama penulis menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan membalas dengan kebaikan bantuan yang diberikan kepada peneliti. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamin Ya Robbal'alamiin.

Pekanbaru, July 2021

Penulis

Nursyakina Najua

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
NOTULENSI PROPOSAL/SKRIPSI	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN PENETAPAN PENGUJI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penelitian	6
BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
2.1 Telaah Pustaka.....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi	8
2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	9
2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa	11
2.1.2.2 Aspek Karakteristik Akuntansi Desa	12
2.1.2.3 Pengguna Akuntansi Keuangan Desa	13
2.1.2.4 Persamaan Akuntansi Desa	13
2.1.3 Siklus Akuntansi Desa	16
2.1.4 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi Desa ..	18
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)	21
2.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Desa.....	24
2.1.8 Akuntansi Aset Tetap	24
2.1.9 Persediaan Alat Tulis Kantor	27
2.2 Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30

3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1 Sejarah Singkat Desa	31
4.1.2 Letak Geografis Desa	32
4.1.3 Kondisi Desa	33
4.1.4 Struktur Organisasi Desa	35
4.1.5 Visi dan Misi	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	36
4.2.1 Dasar Pencatatan Transaksi	37
4.2.2 Proses Akuntansi Pada Desa	37
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan	34
Tabel 4.3	Jenis Pekerjaan.....	34
Tabel 4.4	Kepemilikan Ternak.....	34
Tabel 4.5	Sarana Dan Prasarana.....	35
Tabel 4.6	Buku Kas Umum Desa.....	40
Tabel 4.7	Buku Kas Pembantu Pajak.....	41
Tabel 4.8	Persediaan	45
Tabel 4.9	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD	48
Tabel 4.10	Laporan Kekayaan Milik Desa	50
Tabel 4.11	Belanja Modal	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	35
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 3 : Buku Kas Umum
- Lampiran 4 : Buku Pembantu Pajak Desa
- Lampiran 5 : Buku Pembantu Bank Desa
- Lampiran 6 : Buku Pembantu Kas Tunai
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi Desa Pakning Asal

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa sebagai pihak yang mengelola keuangan desa haruslah memahami dan mengerti tentang akuntansi pemerintahan desa, agar pengelolaan dana desa dapat sesuai dengan yang dianggarkan.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tujuan Pembangunan Desa adalah “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Premendagri No. 113 tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBD Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Desa dan Sekretaris Desa merancang kegiatan untuk melaksanakan APBD Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam tahap Penatausahaan, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Dan mempertanggungjawabkan Uang melalui Laporan Pertanggungjawaban.

Dalam tahap Pelaporan, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota yang meliputi : Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Semester Pertama dan Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Semester Akhir.

Dalam tahap Pertanggungjawaban, Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggran laporan yang meliputi : Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut IAI-KASP (2015) Akuntansi adalah sebuah siklus, yaitu akuntansi terdiri dari beberapa tahapan-tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi desa adalah : 1) Tahap Pencatatan 2) Tahap Pengolongan 3) Tahap Pengikhtisiran dan 4) Tahap Pelaporan.

Laporan keuangan desa berdasarkan IAI-KASP (2015) meliputi : “Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa yang merupakan laporan penjelasan tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disesuaikan oleh APBDesa. Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih aset dengan total kewajiban selama setahun.

Desa Pakning Asal adalah Desa yang berada di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Desa Pakning Asal merupakan salah satu dari sepuluh Desa di Kecamatan Bukit Batu. Saat ini sebagian besar wilayah Desa ini berisi perkebunan karet, sawit dan kelapa. Desa Pakning Asal menyusun laporan keuangannya menggunakan basis kas yaitu teknik pencatatan saat transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Desa Pakning Asal melakukan proses akuntansinya dimulai dari transaksi yang terjadi kemudian dicatat pada Buku Kas Umum (Lampiran 3), kemudian Buku Pajak (Lampiran 4) yang di gunakan bendahara desa mencatat pengeluaran yang

berupa penyetoran pajak. Buku Bank (Lampiran 5) digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan bank. Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) digunakan untuk menyajikan rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum.

Setelah semua proses pencatatan selesai maka bendahara membuat laporan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 2) merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa dengan menggunakan data seperti : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah dijumlah per masing-masing saldo akunya. Setelah itu Desa Pakning Asal membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) untuk mengetahui aset bersih desa sampai dengan tanggal 31 desember.

Berdasarkan data yang diperoleh dan proses akuntansi yang selama ini dilakukan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa permasalahan, yaitu pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) Akumulasi penyusutan aset tetap bersaldo Rp 0.-, dimana bendahara desa tidak menghitung penyusutan aset tetap yang ada seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigrasi dan jaringan. Selanjutnya Desa Pakning Asal juga tidak menghitung saldo persediaan seperti alat tulis kantor, belanja pos dan materai.

Dari penjelasan Latar Belakang Masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan Desa Pakning Asal dengan judul : **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini rumusan masalah nya adalah sebagai berikut : Bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Desa Pakning Asal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas , maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi Desa yang dilakukan oleh Desa Pakning Asal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti serta melihat sejauh mana pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan desa tentang penerapan akuntansi yang seharusnya di terapkan.
2. Bagi Desa Pakning Asal, sebagai bahan masukan atau perbaikan dalam penerapan akuntansi pada desa.
3. Bagi Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah penelitian ini di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam proses penulisan penelitian ini, adapun sistematika penulisan yang direncanakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori, yang menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan diakhiri dengan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa yang terdiri dari sejarah berdirinya dan perkembangan Desa seperti apa, struktur organisasi, dan lokasi terkait Desa serta hasil yang didapatkan saat penelitian, dibahas, di jelaskan, dikaji, dan dievaluasi hasil penelitiannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam bidang akuntansi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pertumbuhan ekonomi salah satu nya ditandai dengan semakin berkembang nya dunia usaha disegala bidang. Didalam dunia usaha, akuntansi sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan baik. Dengan demikian apabila perusahaan menggunakan ilmu akuntansi yang baik, maka dapat menyediakan informasi yang baik pula. Informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam pengambil keputusan.

Menurut Wardayati (2016:1) Mengemukakan bahwa Akuntansi adalah Akuntansi sebagai bahasa bisnis bagi kalangan pengusaha merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penginterpretasian informasi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai salah satu dasar bagi pihak yang berkepentingan (stake holder). Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya manajer dan karyawan perusahaan mewakili pihak intern, sedangkan investor, pihak pemerintah, kreditor, pelanggan, dan masyarakat mewakili pihak ekstern.

Menurut Efendi (2015:1) menyatakan Akuntansi adalah “proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah faktor terdepan yang berperan paling penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial. Akuntansi mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengasilkkan dan membuat informasi-informasi yang relevan.

2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu tempat yang ditinggal dengan jumlah manusia dari ratusan sampai ribuan manusia di daerah pedesaan. Di indonesia desa merupakan bagian dari wilayah yang berada dibawah kecamatan, serta dipimpin oleh seorang penghulu kampung atau biasa disebut Kepala Desa (Kades).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan desa adalah sebagai berikut : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prayitno dan Aris (2018:2) mengemukakan desa adalah bentuk dari kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah yang kegiatan utamanya ialah bertani dan berwenang untuk mengelola kepentingan masyarakatnya serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Menurut Wijaya (2018:1) berdasarkan tipologinya desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1. Desa tertinggal atau desa sangat tertinggal yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju atau mandiri yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai desa, dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu tempat yang dihuni masyarakat dalam suatu permukiman yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan dalam kemasyarakatannya.

Menurut Sujarweni (2015:121) Menyatakan Bahwa Pemerintahan Desa adalah : Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran nya tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Menurut Hery (2014:39) mengemukakan bahwa prinsip akuntansi adalah pendekatan umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi (peristiwa akuntansi).

Menurut Wijaya (2018:136-137) Prinsip Akuntansi merupakan nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Adapun Prinsip-Prinsip Akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Harga Peolehan, mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta , kewajiban/utang , serta pendapat dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Prinsip Realisasi Pendapatan , menentukan cara mengukur dan menentukan nilai pendapatan yang diperoleh. Pendapatan diukur dari penambahan harta dan berkurangnya utang atau bertambahnya kas.
3. Prinsip Objektif , mengacu pada laporan keuangan yang didukung bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh, didalam pembuatan Laporan Keuangan hendaknya mengungkapkan informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi, dalam pembuatan Laporan Keuangan harus mempunyai nilai konsistensi untuk menggunakan metode, pedoman, serta standar pembuatannya.

2.1.2.2 Aspek-Aspek Karakteristik Akuntansi Desa

Aspek-Aspek Karakteristik Akuntansi Desa menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015) adalah :

1. Aspek Fungsi

akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas misalnya Pemerintahan Desa untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas misalnya Kepala Desa yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Karakteristik penting akuntansi meliputi :

- a. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan.
- b. Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.

- c. Informasi keuangan terkait suatu entitas
- d. Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.3 Pengguna Akuntansi Desa

Menurut (IAI-KASP, 2015:6) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1.) Pihak Internal

Merupakan pihak yang berada didalam struktur organisasi desa yaitu, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan/kepala seksi.

2.) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3.) Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer , bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4.) Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa. Misalnya Lembaga swadya desa, RT / RW dan sebagainya.

2.1.1.4 Persamaan Akuntansi Desa

Persamaan dalam Akuntansi merupakan gambaran elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat lima elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, Dan Kekayaan Bersih (IAI-KASP, 2015).

Menurut (IAI-KASP, 2015:9) Akan mudah melakukan pencatatan transaksi jika kita memahami Persamaan Akuntansi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan Akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil tiga elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, maka rumusan persamaan akuntansinya sebagai berikut :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih}$$

b. Persamaan Akuntansi yang diperluas

Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki dua rumus sebagai berikut :

$$\text{Aset} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + \text{Pendapatan} \pm \text{Pembiayaan}$$

Netto

Atau

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + (\text{Pendapatan} - \text{Belanja}) \pm \text{Pembiayaan}$$

Netto

Unsur-unsur yang ada pada Laporan Keuangan Desa menurut (IAI-KASP, 2015 : 9) Sebagai berikut :

1.) Asset

Merupakan Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Asset lancar yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya . misalnya kas , piutang dan persediaan.
- b. Asset tidak lancar yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya investasi permanen, asset tetap, dan cadangan, dan asset tidak lancar lainnya.

2.) Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini bisa berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Misalnya utang kepada pihak ketiga , utang pemotongan pajak , utang cicilan pinjaman dan pinjaman jangka panjang.

3.) Kekayaan Bersih

Merupakan selisih antar aset yang dimiliki dengan kewajiban yang harus dipenuhi sampai tanggal 31 Desember suatu tahun.

4.) Pendapatan

Merupakan penerimaan yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

5.) Belanja

Merupakan semua pengeluaran oleh bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

6.) Pembiayaan

Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaraan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.1.3 Siklus Akuntansi Desa

Menurut Syakur (2015:3) mengemukakan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan proses data yang meliputi aktivitas aktivitas : pembuatan dokumen transaksi, pencatatan transaksi mengelompokkan data, mengikhtisarkan data dan pelaporan data. Siklus akuntansi terjadi dalam satu periode, satu periode akuntansi berumur 12 bulan yang dapat mengikuti tahun kalender (tahun takwim) yang diawali tanggal 1 januari dan diakhiri 31 desember, atau berdasarkan periode yang ditentukan sendiri asalakan berisikan 12 bulan.

Menurut IAI-KASP (2015:12) “Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran,

dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:12) ada beberapa tahapan siklus akuntansi yaitu adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan

demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.1.4 Dasar Pencatatan Transaksi dan Dasar Pengakuan Akuntansi Desa

a. Dasar Pencatatan Akuntansi

Menurut Halim dan Kusufi (2018) Sistem pencatatan di dalam Akuntansi terbagi menjadi tiga jenis yaitu adalah sebagai berikut :

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *Double Entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Dalam sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan ini sisi debit berada sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *Triple Entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *Double Entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan *Double Entry* dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Desa

Dasar pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Menurut Halim dan Kusufi (2018) dasar pengakuan akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Jika itu terjadi maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis Akrua adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

Basis Kas Modifikasi ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran.

4. Basis Akrua Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis Akrua Modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrua untuk sebagian transaksi.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan keuangan desa adalah sebagai berikut : semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur didalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan.

- a. Perencanaan, Langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan dalam perencanaan sekretaris desa wajib menulis segala sesuatu yang telah di musyawarahkan bersama masyarakat setempat dan bersama perangkat desa.
- b. Pelaksanaan, Langkah kedua dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah di sepakati oleh perangkat desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.
- c. Penatausahaan, Langkah ketiga dalam proses pengelolaan keuangan desa, dimana bendahara wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
- d. Pelaporan, Langkah keempat dalam mengelola keuangan desa dimana pelaporan ini adalah proses yang dilakukan bendahara desa untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. pertanggungjawaban, Langkah terakhir dalam pengelolaan keuangan desa dimana seluruh perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan mulai dari perencanaan sampai pelaporan.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Premedagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Transaparan , yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminitif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel , yaitu perwujudan kewajiban memepertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif , yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang Mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran , yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan , serta rencana pembiayaan yang dibahas dan telah

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 terdapat komponen dalam anggaran yang terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :

a.) Pendapatan asli desa

1. Hasil usaha desa
2. Hasil kekayaan desa
3. Hasil swadya dan partisipasi masyarakat
4. Lain-lain pendapatan desa

b.) Transfer

1. Dana desa
2. Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah
3. Alokasi dan desa

c.) Kelompok pendapatan lain-lain

1. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa adalah meliputi semua penereimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 2. Mencakup pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan
 3. Pencairan dana cadangan
 4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 5. Penerimaan pinjaman

- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup
 - 1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan
 - 2. Penyertaan modal desa
 - 3. Pembiayaan hutang

2.1.7 Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut IAI-KASP (2015:12) ada dua penyusunan laporan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa , Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa , Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

2.1.8 Akuntansi Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016:497) mengemukakan bahwa Aset Tetap adalah sebagai berikut : Aset Tetap adalah aset yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan di peroleh untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud.

Menurut Yuliansyah (2017:92) menyatakan bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Perlakuan Akuntansi yang berkaitan dengan Aset Tetap meliputi penentuan harga perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pengeluaran selama pemakaian, dan penyajian aset tetap sebagai berikut :

1. Penentuan Harga Perolehan

Menurut Hery (2014) menyatakan bahwa harga perolehan aset tetap sebagai berikut :

Seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut, dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga beli tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai.

2. Penyusutan Aset Tetap

Semua aset tetap kecuali tanah, memiliki masa manfaat (kemampuan) yang terbatas dalam mendukung operasional perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan suatu aset tetap yaitu pemakaian, keusangan, tidak seimbang antara kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi.

Menurut Martani (2012) mengemukakan bahwa Penyusutan atau depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut.

Menentukan besarnya beban penyusutan dapat dilakukan dengan beberapa metode yang dikelompokkan menurut kriteria sebagai berikut :

a. Berdasarkan Waktu

1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

2) Metode Pembebanan Menurun

b. Berdasarkan Penggunaan

1) Metode Jam Jasa (*service Hour Method*)

2) Metode Jumlah Unit Produksi (*Produktive Output Method*)

c. Berdasarkan Kriteria Lainnya

1) Metode berdasarkan jenis dan kelompok

2) Metode Anuitas (*Annuity Method*)

3) Sistem Persediaan (*Inventory Method*)

Berikut contoh Jurnal Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight Line Method*) :

Aset Tetap yang tertera dalam Laporan Keuangan Desa seperti Peralatan dan Mesin sebesar Rp102.953.000 umur ekonomis diaksir 5 Tahun , gedung dan bangunan sebesar Rp197,146.714 umur diaksir 10 tahun, serta jalan dan irigrasi sebesar Rp49,713.525 umur ekonomis diaksir 20 Tahun. Berdasarkan Metode Garis Lurus Penyusutan Aset Tetap dapat dihitung sebagai berikut :

Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin

$$\text{Pertahun} = \frac{\text{Rp 102.953.000}}{5 \text{ tahun}}$$

$$= \text{Rp } 20.590.600$$

Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

$$\begin{aligned} \text{Pertahun} &= \frac{\text{Rp } 197.146.714}{10 \text{ Tahun}} \\ &= \text{Rp } 19.714.671 \end{aligned}$$

Adapun contoh jurnal Penyesuaianya sebagai berikut :

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp19.714.671

 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp19.714.671

3. Pengeluaran Selama Pemakaian Aset Tetap

Penilaian aktiva tetap berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Ada dua jenis pertukaran yaitu, nilai keluar dan nilai masukan. Nilai keluar adalah aliran dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan dimasa uang akan datang sesuai dengan harga pertukaran. Sedangkan nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Macam-macam pengeluaran yang berhubungan dengan penggunaan aktiva tetap :

1. Pengeluaran Pemeliharaan
2. Pengeluaran Reparasi
3. Pengeluaran Penggantian
4. Pengeluaran Perbaikan
5. Pengeluaran Penambahan

4. Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan

Dalam Laporan Keuangan, Penyajian aset tetap akan terlihat dalam neraca, neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, hutang, dan modal pada suatu tanggal tertentu. Aset tetap yang disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Setiap jenis aset tetap seperti : tanah, bangunan, inventaris dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau dirinci dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Mulyadi (2016) ada beberapa prinsip akuntansi yang erat kaitannya dengan penyajian aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Dasar penilaian aset tetap harus dicantumkan dalam neraca.
2. Aset Tetap yang digadaikan harus dijelaskan.
3. Jumlah Akumulasi Depresiasi dan biaya Depresiasi untuk tahun ini harus ditunjukkan dalam Laporan Keuangan.
4. Metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aset tetap harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan.
5. Aset Tetap harus dipecah kedalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material.
6. Aset Tetap yang telah habis di depresiasikan namun masih digunakan untuk beroperasi, jika jumlahnya material harus dijelaskan.

2.1.9 Persediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari , misalnya pulpen, pensil, penghapus, tinta, kertas, jepitan kertas, dan lain sebagainya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan Alat tulis kantor adalah persediaan yang diperlukan dalam menunjukkan fungsi organisasi dan tidak menjadikan bagian dari akhir periode. Berdasarkan pengertian Persediaan dan Pengertian Alat Tulis Kantor dapat disimpulkan bahwa persediaan Alat tulis kantor menunjukkan barang-barang mencakup kertas, buku, kartu-kartu, pensil, dan sebagainya yang disimpan dan dikelola dalam antisipasinya terhadap pemenuhan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Contoh jurnal untuk Persediaan Alat Tulis Kantor saat pembelian dan pada akhir periode jurnal penyesuaianya :

1. Jurnal Pembelian Persediaan ATK

Persediaan Alat Tulis Kantor	xxxxxx
Kas	xxxxxx

2. Jurnal Penyesuaian ATK

Beban Bahan Habis Pakai	xxxxxx
Persediaan Alat Tulis Kantor	xxxxxx

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Diduga penerapan akuntansi pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

3.2 Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pakning Asal.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung kepada kepala desa dan bendahara desa untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan Desa Pakning Asal dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan Desa seperti, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu interview langsung kepada kepala desa dan bendahara desa.
2. Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen desa, dan buku laporan keuangannya.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan membandingkan setiap teori yang terkait penerapan akuntansi dengan kenyataan yang terjadi pada desa tersebut kemudian dibahas dengan teliti untuk kemudian diberikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pakning Asal

Desa Pakning Asal adalah hasil pemekaran dari Desa Sejangat yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu.

Walaupun sudah diterbitkan PERDA Kabupaten Bengkalis mengenai pembentukan Desa Pakning Asal, akan tetapi Desa Pakning Asal baru diresmikan oleh Bupati Herliyan Saleh pada tanggal 28 November Tahun 2013, Selanjutnya roda Pemerintahan Desa baru mulai berjalan pada bulan Januari Tahun 2013 dengan Penjabat Kepala Desa Bapak Akmaludin berasal dari pegawai struktural Kecamatan Bukit Batu. di tahun 2017 diadakan pemilihan Kepala Desa kembali dan terpilih Bapak Jaswir sampai dengan sekarang.

Asal nama Pakning Asal diambil dari nama Sungai Pakning yang Lokasinya muara sungainya berada di Desa Pakning Asal, yang kenyataannya sekarang ini nam Sungai Pakning Notabene dipakai untuk nama sebuahkelurahan bersebelahan (sebelah utara) dengan Desa Pakning Asal yang sebenarnya dulu kawasan ini pada

masa pemerintahan Soeharto masih satu Desa dan belum terpecah pecah menjadi beberapa seperti saat sekarang ini. Oleh sebab itu para tokoh masyarakat dan orang yang dituakan di Desa Pakning Asal ini berniat mengambil kembali nama “Pakning” untuk dijadikan nama Desa sekarang ini dengan tujuan agar nama muara Sungai Pakning tidak hilang, selanjutnya kata “Asal” adalah perwujudan dari asal mula sejarah nama Sungai Pakning, sehingga para tokoh adat dan masyarakat sepaka desa ini diberi nama Desa “ Pakning Asal”.

Bahasa yang digunakan sehari hari oleh masyarakat Desa Pakning Asal adalah bahasa melayu. Hal ini dikarenakan hampir 80% masyarakat Desa Pakning asal bersuku melayu, adapun suku lainnya yaitu suku banginang, minang, jawa dan batak, nias dan suku bangsa etnis cina. Islam sekitar 91% sedangkan 9% lainnya penganut agama katolik dan budha. Dan aliran kepercayaan kongfusu walaupun adanya perbedaan baik suku dan agama, ketentraman tetap terjaga dengan baik, dengan saling menghormati satu sama lain.

4.1.2 Letak Geografis Desa

Desa Pakning Asal adalah Sebuah Desa yang masih terletak di daerah Pinggiran Pantai Selat Bengkalis yang berada dalam cakupan wilayah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Dengan luas wilayah 35 KM. Mempunyai tiga dusun yaitu : Dusun Pakning Asal , Dusun Sukajadi , Dan Dusun Sukoharjo.

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan sungai pakning

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sejangat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa bukit batu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan selat bengkalis

4.1.3 Kondisi Desa

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
Laki-laki	677	682	672
Perempuan	350	354	358
Jumlah	1027	1036	1030

Sumber : Desa Pakning Asal

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Akademi	Sarjana
1388	813	265	927	57	183

Sumber : Desa Pakning Asal

Tabel 4.3
Pekerjaan

Petani	Nelayan	Pedagang	PNS	TNI/ POLRI	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Buruh
278	48	117	114	4	124	221	334

Sumber : Desa Pakning Asal

Tabel 4.4
Kepemilikan Ternak

Ayam	Itik	Kambing	Sapi	Kerbau
1500	1200	150	150	7

Sumber : Desa Pakning Asal

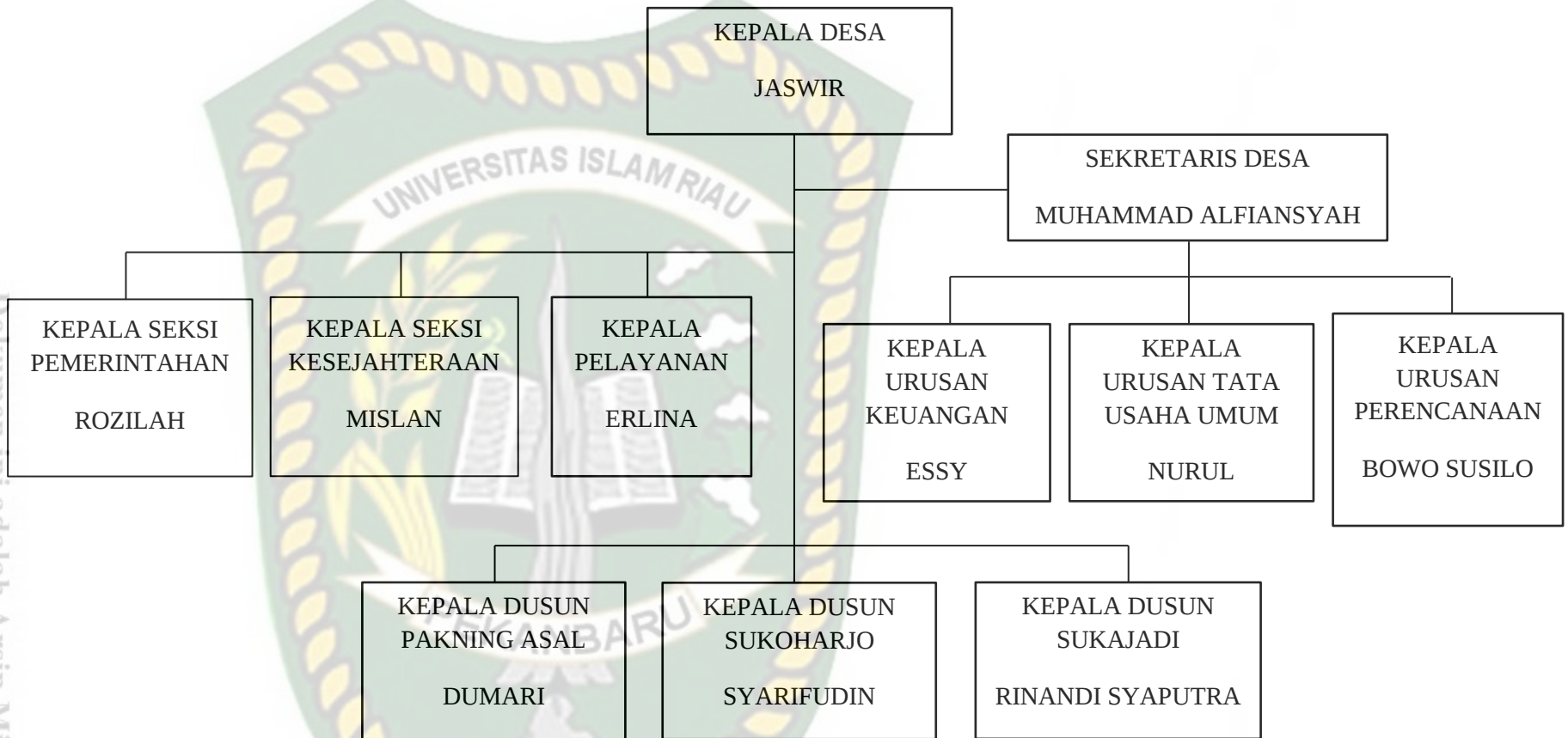
Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Desa

No	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Layak Pakai
2	Balai Desa	1	Layak Pakai
3	PAUD/TK	2	Layak Pakai
4	SD	1	Layak Pakai
5	SLTP	1	Layak Pakai
6	SLTA	1	Layak Pakai
7	Madrasah	2	Layak Pakai
8	Masjid	3	Layak Pakai
9	Surau	6	Layak Pakai
10	Pos Keamanan	5	Layak Pakai
11	Kuburan	4	Layak Pakai
12	Sumur Bor	55	Layak Pakai
13	Sampan	-	
14	Jembatan	-	
15	Dermaga	-	
16	Gerobak	-	
17	Mesin listrik	-	
18	Sungai	-	
19	Jalan batu	-	
20	Jalan aspal	-	
21	Sepeda motor	-	
22	Becak	-	
23	Lapangan olahraga	-	
24	Telepon	-	
25	Toko / kedai	-	
26	Kios / warung	-	
27	Pasar Khusus	-	
28	Pasar biasa	-	

Sumber : Desa Pakning Asal

4.1.4 Struktur Organisasi Desa

Gambar 4.I
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pakning Asal
Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis



4.1.5 Visi Dan Misi Desa

1. Visi

Visi yang dibuat oleh Desa Pakning Asal adalah “ Menjadikan Desa Pakning Asal Desa Sejahtera dan Mandiri”

2. Misi

Adapun misi dari Desa Pakning Asal adalah :

- a. Menjadikan Desa Pakning Asal Desa panutan dalam bidang pertanian, nelayan/perikanan dan bidang lainnya.
- b. Menjadikan Desa Pakning Asal. Desa yang bersih, serta berjiwa gotong royong dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan.
- c. Menjadikan Desa Pakning Asal Desa wisata, sehingga menjadi salah satu tempat tujuan dalam keparawisataan Kabupaten Bengkalis Riau.
- d. Meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dengan memiliki perangkat yang berkualitas, mampu bekerja dengan baik, melayani masyarakat dengan tulus ikhlas, berjiwa religi serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebudayaan setempat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pakning Asal Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis . Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I dan dengan pedoman teoritis yang relevan seperti diuraikan pada Bab II , maka penulis akan mencoba menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis.

4.2.1 Dasar Pencatatan Transaksi

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran Buku Kas Umum yang digunakan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah menggunakan sistem pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku, dimana transaksi hanya dicatat pada kolom penerimaan apabila transaksi menambah saldo kas Desa dan kolom pengeluaran apabila transaksi mengurangi saldo kas Desa.

Dasar Pencatatan Transaksi yang digunakan Desa Pakning Asal menggunakan basis kas (*cash basic*), untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran yaitu teknik pencatatan saat transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan milik desa diakui saat terjadinya transaksi.

4.2.2 Proses Akuntansi Pada Desa Pakning Asal

Desa Pakning Asal melakukan proses akuntansinya dimulai dari transaksi yang terjadi kemudian dicatat pada Buku Kas Umum (Lampiran 3), kemudian Buku Pajak (Lampiran 4) yang digunakan bendahara desa mencatat pengeluaran yang berupa penyetoran pajak. Buku Bank (Lampiran 5) digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan bank. Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) digunakan untuk menyajikan rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum.

Setelah semua proses pencatatan selesai maka bendahara membuat laporan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (Lampiran 2) merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa dengan menggunakan data seperti : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah dijumlah per masing-masing saldo akunnnya. Setelah itu Desa Pakning Asal membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) untuk mengetahui aset bersih desa sampai dengan tanggal 31 Desember.

Desa Pakning Asal tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap yang ada seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigrasi dan jaringan. Selanjutnya Desa Pakning Asal juga tidak menghitung saldo persediaan seperti alat tulis kantor, belanja pos dan materai.

1) Tahap Pencatatan

Yaitu proses awal dari akuntansi dengan mencatat bukti transaksi kedalam buk-buku yang sesuai . seperti Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pajak.

1. Buku Kas Umum

Semua kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai yang terjadi di Desa Pakning Asal dicatat dalam Buku Kas Umum.

Contohnya adalah sebagai berikut Pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Buku Kas Umum
Desa Pakning Asal
Tahun Anggaran 2020

No	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	9/12/2020		Kas dibendahara	56.000.000		438.292.7 49
2	9/12/2020		Operasional LPTQ	3.745.000		442.037.7 49
3	9/12/2020		Belanja jasa langganan listrik		1.890.000	438.292.7 49
4	9/12/2020		Belanja alat tulis kantor dan benda pos		150.000	443.142.7 49

Sumber : Desa Pakning Asal

Dapat disimpulkan pencatatan yang telah dibuat oleh Desa Pakning Asal sudah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP, 2015).

2. Buku Bank

Buku Bank mencatat penerimaan dan pengeluaran uang, melalui Bank. Pencatatan di buku bank dilakukan secara kronologis. Buku Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo bank. Pada Buku Bank

pemerintahan mencatat melalui dana ADD, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi daerah, bagi hasil pajak daerah.

Dapat disimpulkan pencatatan pada Buku Bank yang dilakukan oleh Desa Pakning Asal sudah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Komptemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP, 2015) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan yang berhubungan dengan pajak. Contohnya pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Pakning Asal

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/03/2020	Dibayar biaya ATK kegiatan STQ Potongan pajak PPn Pusat	90.909,00	0,00	397.909,00
2	26/03/2020	Dibayar biaya cetak dan pengadaan STQ Potongan pajak PPH Pasal 23	13.636,00	0,00	411.545,00
3	26/03/2020	Dibayar biaya pembuatan spanduk kegiatan STQ Potongan pajak PPH Pasal 23	6.000,00	0,00	772.025,00
4	26/03/2020	Dibayar biaya honorium dewan hakim kegiatan STQ Potongan Pajak PPH Pasal 21	168.000,00	0,00	940.025,00

Sumber : Desa Pakning Asal

Dapat disimpulkan pencatatan yang dilakukan oleh Desa Pakning Asal pada Tabel diatas sudah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP, 2015).

2. Tahap Penggolongan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memudahkan kita dalam menganalisis data keuangan. Selanjutnya tahap ini mengelempokkan catatan bukti transaksi pada kelompok buku besar sesuai nama akun saldo-saldo yang dicatat dan dinilai kedalam debit dan kredit. Desa Pakning Asal tidak membuat buku besar pembantu Karena dalam pelaporan Desa udah menggunakan Aplikasi SISKEUDES, dimana pada Aplikasi SISKEUDES telah membuat buku kas pembantu kegiatan yang berguna untuk mencatat semua jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa dan dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan masing-masing , sehingga penerapan Akuntansi di Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Tahap Pengkikhtiran

a. Neraca Saldo

Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat Neraca Saldo, Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tidak membuat Neraca Saldo karena telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES yang dapat melakukan proses akuntansi dan mengelola keuangan desa secara otomatis sehingga Laporan Keuangan bisa dicetak langsung sehingga Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan Prinsip-

Prinsip Akuntansi Berterima Umum. seharusnya Desa Pakning Asal membuat Neraca Saldo untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan pencatatannya benar.

b. Pengumpulan Data Penyesuaian

Pada tahap setelah transaksi pengikhtisiran buku besar ke neraca saldo, tahap selanjutnya adalah tahap penyesuaian meliputi :

1. Persediaan bahan habis pakai

Melakukan perhitungan sisa persediaan yang masih ada pertanggal laporan. Bahan habis pakai merupakan aset entitas yang dimaksudkan untuk digunakan sekali atau dalam waktu singkat dengan nilai satuan kecil. Yang termasuk bahan habis pakai adalah alat tulis kantor, belanja pos, dan materai. contoh persediaan Desa Pakning Asal pada Laporan Realisasi Anggaran pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Persediaan

No	Persediaan	2019	2020
1	Belanja alat tulis kantor dan benda pos	20.500.166	40.000,166
2	Belanja alat kebersihan	1.800.000	1000.000
3	Belanja cetak dan pengadaan	950.000	950.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Akan tetapi pada Laporan Kekayaan Milik Desa pada (Lampiran I) persediaan bersaldo Rp 0-, ini menunjukkan bahwa seluruh persediaan diakhir periode telah habis terpakai. Seharusnya Desa Pakning Asal menghitung sisa persediaan diakhir periode pada Laporan Kekayaan Milik Desa yang akan mempengaruhi nilai aset lancar dan nilai ekuitas aset bersih desa. Jurnal Seharusnya pada saat Pembelian

Persediaan ATK dengan mendebit Persediaan Alat Tulis Kantor dan mengkredit Kas dan pada akhir periode jurnal penyesuaiannya dengan mendebit Beban Bahan Habis Pakai dan Mengkredit Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar jumlah yang tersisa pada akhir periode.

2. Pemakaian Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai dari peristiwa masa lalu dari manfaat ekonomi sosial dimasa depan dapat diperoleh, Baik pemerintah maupun masyarakat.

Aset tetap yang tertera dalam Laporan Keuangan Desa Pakning Asal seperti (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigrasi dan jaringan) disajikan berdasarkan perolehan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seharusnya Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin, jalan, irigrasi dan jaringan yang disajikan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan nilai sebenarnya dan berpedoman pada Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut contoh aset tetap yang disusutkan:

a. Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{200.650.000,00}{5 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp } 40.130.000,00 \end{aligned}$$

Adapun Jurnal Penyesuaian nya sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp40.130.000,00
--------------------------------------	-----------------

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp40.130.000,00

b. Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{690.346.500,00}{10 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp } 69.034.650 \end{aligned}$$

Adapun Jurnal Penyesuaiannya Sebagai Berikut :

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp69.034.650

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp69.034.650

c. Penyusutan untuk Jalan, Irigrasi dan Jaringan

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{1.669.385.140,00}{20 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp } 83.469.257,00 \end{aligned}$$

Adapun Jurnal Penyesuaiannya Sebagai Berikut :

Beban Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan Rp83.469.257,00

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan Rp83.469.257,00

5. **Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada Laporan ini menyajikan informasi realisasi seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini disusun setahun sekali. Pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Pakning Asal
Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
	Pendapatan asli desa	13.500.000	13.500.000	0
	Hasil usaha desa	1.500.000	1500.000	0
	Bagi hasil BUMDesa	1.500.000	1.500.000	0
	Lain – lain pendapatan asli desa	12.000.000	12.000.000	0
	Pendapatan Transfer	2.999.752.306	2.999.752,306	0
	Dana desa	1.104.797.000	1.104.797.000	0
	Bagi hasil pajak dan retribusi	32.993.827	31.104.950	1.888.877
	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	32.993.827	31.104.950	1.888.877
	Alokasi dana desa	1.676.961.479	1.676.961.479	0
	Bantuan keuangan Provinsi	85.000.000	85.000.000	0
	Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	85.000.000	85.000.000	0
	Bantuan keuangan kabupaten/kota	100.000.000	100.000.000	0
	Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota	100.000.000	100.000.000	0
	Pendapatan lain-lain	3.114.689	3.114.689	0
	Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya	3.114.689	3.114.689	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.016.367.004	3.016.367.004	1.888.887
2	BELANJA			
	Bidang penyelenggara pemerintahan desa	1.426.389.051	1.404.225.166	22.163.885
	Bidang pelaksanaan	859.758.100	838.997.040	20.761.06

	pembangunan desa			
	Bidang pembinaan kemasyarakatan	320.304.387	275.304.387	45.000.000
	Bidang pemberdayaan masyarakat	87.171.622	82.021.061	5.150.561
	Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak	514.078.803	507.215.000	6.863.803
	JUMLAH BELANJA	3.207.701.963	3.107.762.6540	99.939.309
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(191.334.959)	(93.284.527)	(98.050.432)
3	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan pembiayaan	242.334.959	242.334.959	0
	SILPA tahun sebelumnya	242.334.959	242.334.959	0
	Pengeluaran pembiayaan	51.000.000	51.000.000	0
	Penyertaan modal desa	51.000.000	51.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	191.334.959	191.334.959	0
	SILPA TAHUN BERJALAN	0	98.050.432	(98.050,432)

Sumber : Desa Pakning Asal

Dapat disimpulkan bahwa Laporan yang dibuat Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis sudah sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia Akuntansi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP, 2015).

2. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan adalah arus masuk atau hasil yang diperoleh perusahaan maupun pemerintahan dalam pelaksanaan operasionalnya selama suatu periode tertentu. Sedangkan Beban adalah arus yang menggambarkan perubahan yang tidak menguntungkan bagi pihak manapun. Beban biasanya timbul karena adanya aktivitas

yang terbentuk pada arus kas atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan serta aset tetap.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis bahwa Pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan atau disebut teknik pencatatan *cash basis*. untuk Pengakuan Beban yang digunakan Desa Pakning Asal adalah menggunakan *cash basis*.

3. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan Desa Pakning Asal mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada periode satu tahun. Kekayaan desa merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa.

Laporan Kekayaan Milik Desa yang telah dibuat oleh Desa Pakning Asal telah sesuai dengan IAI-KASP (2015) tetapi tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap, seharusnya Desa Pakning Asal melakukan penyusutan terhadap aset tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berikut contoh Laporan Kekayaan Milik Desa yang harus diterapkan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Laporan Kekayaan Milik Desa
Desa Pakning Asal
31 Desember 2020

URAIAN		TAHUN 2020	TAHUN 2019
1		2	3
ASET			
Aset lancar			
Kas dan Bank		98.050.432	242.334.959
Kas dibendahara desa		0	0
Rekening kas desa		98.050.432	98.050.432
Piutang		0	0
Persediaan			
Persediaan benda pos dan materai		0	0
Persediaan alat tulis kantor		0	0
Persediaan blangko dan barang cetakan		0	0
Dst		0	0
JUMLAH ASET LANCAR		98.050.432	242.334.959
Investasi			
Penyertaan modal pemerintahan desa		51.000.000	51.000.000
Aset tetap			
Tanah		131.600.000	131.600.000
Peralatan dan mesin	200.650.000		187.550.000
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(40.130.000)	160.520.000	
Gedung dan bangunan	690.346.500		645.697.500
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(69.034.650)	781.831.850	
Jalan, irigrasi dan jaringan	1.669.385,140		1.152.845.800
Akumulasi	(83.469.257)	1.585.915.883	

penyusutan jalan,irigrasi dan jaringan			
Aset tetap lainnya		75.650.000	25.650.000
Dst		0	0
Dana cadangan			
Dana cadangan		0	0
Aset tidak lancar			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		2.961.682.072	2.385.678.259
JUMLAH ASET (A+B)		3.059.732.504	2.628.013.218
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		3.059.732.504	2.628.013.218

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka Laporan Kekayaan Milik Desa yang dimiliki oleh Desa Pakning Asal Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis sebelum dilakukan penyusutan adalah sebesar Rp2.916.682.072,00 Dan setelah menghitung penyusutan pada aset tetap maka Laporan Kekayaan Milik Desa Pakning Asal adalah sebesar Rp3.059.732.504,00 Yang terjadi karena adanya penyusutan terhadap aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan.

4. Tabel Belanja Modal

**Tabel Belanja Modal
Tahun 2019-2020
Desa Pakning Asal**

No	Jenis Belanja Modal	2019	2020
1	Pengadaan tanah	Rp 0	Rp20.230.024
2	Peralatan, mesin dan alat berat	Rp63.802.195	Rp5.621.352
3	Kendaraan	Rp25.000.000	Rp0
4	Gedung, Bangunan dan Taman	Rp327.749.500	Rp15.994.000
5	Jalan/Prasarana Jalan	Rp413.339.200	Rp291.017.749
6	Jembatan	Rp86.127.300	Rp0
7	Irigasi/embung	Rp16.000.000	Rp16.000.000
8	Modal lainnya	Rp190.419.857	Rp50.000.000

Sumber : Desa Pakning Asal

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Dasar Pencatatan yang dilakukan oleh Desa Pakning Asal yaitu menggunakan basis kas (cash basic) merupakan teknik pencatatan saat uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.
2. Dalam proses akuntansi pada Desa Pakning Asal sudah sesuai dan mengikuti IAI-KASP, 2015.
3. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Pakning Asal tidak menghitung sisa persediaan bahan habis pakai.
4. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintahan Desa Pakning Asal tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap.
5. Penerapan Akuntansi Pada Desa Pakning Asal belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

1. Seharusnya Pemerintahan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis menggunakan dasar pengakuan berbasis akrual (Accrual Bassis) berarti semua transaksi dicatat dan diakui tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
2. Seharusnya Pemerintahan Desa Pakning Asal menghitung penyusutan persediaan bahan habis pakai pada Laporan Kekayaan Milik Desa,

sehingga Laporan Keuangan yang disajikan lebih Akurat dan tidak menjadi salah informasi.

3. Seharusnya Pemerintahan Desa Pakning Asal melakukan Penyusutan terhadap Aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Seharusnya Pemerintahan Desa Pakning Asal menyusun Laporan Keuangan nya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Rizal. 2015 . *Accounting Principles Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP* , Jakarta : Rajawali Pers.
- Erlina, Omar S. Rambe, dan Rasdianto 2015 . *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual* , Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Hery. 2014. *Aanalisi Laporan Keuangan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Martani, Dwi 2012 . *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* , Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Syakur, Ahmad Syafi'i. 2015. *intermediate Accounting : dalam persepektif lebih luas*, Jakarta : Av Publisher.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Prayitno, Gunawan dan Aris Subagjo . 2018. *Membangun Desa : Merencanakan Desa dengan Pendekatan Prinsip Partisipatif dan Berkelanjutan* , Malang : UB Press.
- Wardayati , Siti Maria. 2016 . *Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Koperasi*, Malang : Selaras Media Kreasindo.
- Wijaya, David. 2018 . *Akuntansi Desa*, cetakan pertama, Yogyakarta : Gava Media.
- Yuliansyah, Rusmianto. 2017 . *Akuntansi Desa*, Cetakan Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia , 2015 . *Kompartemen Akuntansi Sektor Publik, Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6. 2014. Yang mengatur tentang Desa.
Jakarta.

